

# **PARTAI ISLAM KONTEMPORER: DARI IDEOLOGIS KE PRAGMATIS**

*Sudarno Shobron*

Prodi Ushuluddin Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Telp. (0271) 717417 Surakarta 57102  
E-mail: d4rno561@yahoo.com

**Abstract:** *There are three elements in political science that relate each other. They are power, interest, and competition. Islamic political parties and political parties that have Islamic mass cannot get out of the interest to get the power by competing with the same Islamic parties and non Islamic parties. The competition to get power is sometimes done through various means and strategies. One of them is by not holding the ideology rigorously. The ideology is just used as an ornament to attract mass and it is sometimes thrown away just to get power. The Islamic political parties and non Islamic parties can do cooperatively to get power such as to reach the mayor, governor and president position that is based on the same interest. Otherwise among Islamic parties cannot do cooperatively because they do not have the same interest.*

*This article analyzes the recent trends in Islamic political parties that initially hold Islamic ideology tightly but in the end they think pragmatically to get power. The case in General Election 2009 is the example. Islamic political parties supported the president candidate from Democrat Party in the hope that they got minister and strategic positions in the executives. The Islamic parties did not have spirits to unite to nominate a president from the internal parties though they had the requirements to nominate their own candidate. It is clear that there is displacement from ideological parties to pragmatic ones.*

**Key words:** *Islamic party, ideological, pragmatic*

**Abstrak:** *Dalam Ilmu politik ada tiga unsur yang saling terkait, yakni power (kekuasaan), interest (kepentingan), dan competition (persaingan). Partai-partai Islam dan partai yang berbasisi massa Islam tidak lepas dari kepentingan untuk meraih kekuasaan dengan cara bersaing dengan sesama partai Islam sendiri dan dengan partai non Islam. Persaingan untuk meraih kekuasaan kadang ditempuh dengan cara melakukan segala cara dan strategi, salah satunya tidak memegang teguh ideologi secara kaku. Ideologi dibutuhkan sebagai daya tarik untuk menarik massa, namun kadang ditinggalkan hanya karena kepentingan untuk meraih power. Partai Islam dapat bekerjasama dengan partai non-Islam dalam merebut kekuasaan, misalnya kursi bupati/walikota, gubernur, dan presiden didasarkan pada kepentingan yang sama. Sebaliknya partai Islam tidak dapat bekerjasama dengan sesama partai Islam dikarenakan tidak memiliki kepentingan yang sama.*

*Artikel ini menganalisis kecenderungan partai Islam Indonesia yang semula memegang*

*ideologi Islam begitu kuat, akhirnya berpikir pragmatis untuk memperoleh kekuasaan. Kasus pemilihan umum tahun 2009 partai-partai Islam rame-rame mendukung calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat, dengan harapan memperoleh kursi menteri dan jabatan-jabatan strategis di lembaga eksekutif. Partai Islam tidak memiliki semangat persatuan untuk mengusung calon presiden dari kalangan internal sendiri, padahal memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri. Jelaslah ada pergeseran dari partai ideologis ke partai pragmatis.*

**Kata kunci:** Partai Islam, ideologis, pragmatis.

## PENDAHULUAN

Ada pertanyaan klasik yang mendasar, tetapi tetap aktual sampai saat ini, yaitu mengapa umat Islam yang jumlahnya banyak ini (88,22 %), terbesar di dunia, tidak dapat memainkan peran dominan dalam wilayah politik? Bahkan sering hanya menjadi pengusung dan pendukung kekuatan politik non-Islam. Percaturan elit politik menjelang pemilu 2009 yang lalu misalnya, kekuatan partai Islam memberikan dukungan kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Hal ini berbeda dengan pemilu 2004, banyak bermunculan politik santri yang berebut kursi presiden, misalnya Amien Rais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, dan Shalahuddin Wahid, bahkan Abdurrahman Wahid juga ikut—namun tidak lulus uji persyaratan—walaupun kesemuanya hanya “gigit jari” karena tidak ada satupun yang memenangkan pertarungan ke RI 1 dan RI 2. Kalau pemilu 2004 ada pertarungan politik santri dan politik abangan, yang dimenangkan oleh politik abangan, pemilu 2009 hanya politik abangan yang bermain, Megawati-Prabowo (jawa-jawa; sipil-militer), Yusuf Kalla–Wiranto (luar jawa-jawa; sipil-militer) dan SBY-Boediono (jawa-jawa; militer-sipil).<sup>1</sup> Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditambah beberapa partai Islam lainnya, misalnya Partai Bintang Bulan (PBB), Partai

Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Kebangkitan Nasional Umat (PKNU) yang kalau dihitung telah memenuhi syarat untuk mengusung capres-cawapres sendiri, ternyata tidak ada keberanian untuk menjadi kekuatan alternatif yang mengusung politik santri sendiri. Jangankan mengusung capres-cawapres sendiri, menjadi kekuatan oposisi saja tidak berani, padahal menjadi oposisi juga sama baiknya dengan yang tidak oposisi. Kekuatan oposisi itu penting dalam kehidupan politik, karena menjadi penyeimbang pemerintah di dalam mengendalikan roda pemerintahan. Daripada pendukung kekuatan politik lain, yang belum jelas memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam. Kekuatan oposisi merupakan posisi mulia, karena dapat dengan leluasa melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar. Apalagi PKS—dulu Partai Keadilan—pernah menyatakan sebagai partai dakwah, semestinya menjadi pelopor untuk melakukan dakwah di luar sistem pemerintah. Namun hal ini tidak ditemukan semangat dakwah, maunya mendapatkan bagian “kue”. Padahal kalau peran ini dimainkan bersama partai-partai Islam dan partai yang memiliki basis massa Islam, sungguh amat cantik dalam berpolitik, disamping mempersiapkan diri, melakukan konsolidasi, koordinasi yang matang untuk lima tahun kedepan.

## KEKALAHAN DALAM PEMILU

Sejak pemilu pertama (1955) sampai

pemilu 2009 politik Islam yang dipresentasikan oleh partai Islam<sup>2</sup> tidak pernah absen dari keterlibatannya dalam membangun demokrasi lewat pemilihan umum (pemilu). Terhitung sejak Indonesia merdeka sampai orde reformasi sekarang ini, telah diselenggarakan pemilu sebanyak 10 kali, 1 kali pada masa orde lama (1955), 6 kali pada masa orde baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), dan 3 kali pada masa orde reformasi (1999, 2004 dan 2009). Pemilu yang terakhir ini (2009) merupakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat—DPR—dan Dewan Perwakilan Daerah—DPD) telah serentak diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia, pada hari Kamis tanggal 9 April 2009, kecuali beberapa daerah tertentu pemilu diselenggarakan setelah hari Kamis.<sup>3</sup> Penundaan ini disebabkan (1) cacaca yang tidak mendukung; (2) tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan; dan (3) kesalahan administrasi. Walaupun pemilu telah selesai dilaksanakan bukan berarti tidak meninggalkan masalah, ada beberapa kelompok telah mengambil sikap yang tegas tentang pelaksanaan pemilu, dan kalau dipetakan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. *Pertama*, kelompok Wiranto, yang menyatakan bahwa pemilu 2009 merupakan pemilu yang terjelek sepanjang sejarah Indonesia, karena didasarkan pada data banyaknya warga negara yang memiliki hak pilih tidak dapat memilih atau menggunakan haknya, disebabkan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Kedua*, kelompok Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa pemilu telah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, kalupun ada telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau tidak puas dan menemukan kejanggalan, dipersilahkan diselesaikan melalui jalur hukum; dan *ketiga*, kelompok golongan putih (golput) yang dimotori oleh sebagian mahasiswa, menyatakan tidak mengikuti pemilu

karena pemilu tidak dapat merubah Indonesia menjadi lebih maju. Pemilu hanya mempertahankan status quo saja.

Apapun pendapat mereka, pemilu sebagai salah satu perwujudan dari demokrasi telah terlaksana dan mereka menerima hasil pemilu. Dari pemilu ke pemilu telah diikuti oleh berbagai partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda, dan cenderung menunjukkan peningkatan di setiap pemilunya. Hal ini bisa jadi menunjukkan begitu antusiasnya masyarakat di dalam mengikuti pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah partai politik peserta pemilu:

Tabel 1  
Jumlah Partai Peserta Pemilu 1955-2009

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

Menyimak tabel di atas, jumlah partai politik Islam yang ikut pemilu ternyata cukup banyak. Tahun 1955 masih ada kebebasan untuk menyantumkan ideologi partai berdasarkan agama, maka jumlah partai politik yang berideologi Islam ada 6 partai dari 28 partai. Namun jumlah suara yang diperoleh belum dapat mengalahkan partai nasionalis dan komunis. Pemilu yang pertama kali di-

selenggarakan setelah Indonesia merdeka ini menjadi menarik karena sebagai eksperimen demokrasi<sup>4</sup> dan peluang bagi umat Islam. Eksperimen demokrasi<sup>5</sup>, begitu tepat dikatakan, karena baru pertama kali mengadakan pemilu secara nasional, dan dalam pemilu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, memberikan kedaulatan untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Dikatakan peluang bagi umat Islam, karena ada harapan dapat memenangkan pemilu, sebab apabila umat Islam menang dalam pemilu, maka keinginan untuk memasukkan lagi Piagam Jakarta ke dalam konstitusi terbuka luas. Konstitusi membutuhkan dukungan suara dua pertiga anggota untuk dapat menggolkan suatu keputusan. Apabila jumlah suara itu terpenuhi, maka secara politis umat Islam menang, sehingga dapat membawa bangsa ini sesuai dengan syariat Islam, bahkan dengan mudah untuk merubah dasar negara, dari Pancasila ke Islam. Harapan ini tinggal harapan semata, kenyataannya bicara lain. Partai-partai Islam tidak memenangkan pemilu, bahkan kalau suara dari partai Islam itu dikumpulkan tidak sampai 50 %. Berawal dari pemilu pertama inilah, umat Islam terus terpinggirkan dalam kancah perpolitikan nasional, tidak menjadi “tuan di rumah sendiri”, tetapi menjadi “tetangga jauh” yang terus diawasi dan diwaspadai gerak geriknya.

Pada tahun 1971 jumlah partai politik yang berideologi Islam ada 4 partai dari 10 partai peserta pemilu. Nasibnya tidak lebih baik dari pemilu 1955, karena kalau dijadikan satu jumlah suaranya hanya mendapatkan 27,2 %.<sup>6</sup> Ada salah satu partai yang ditengarai merupakan wajah baru dari Masyumi, yakni Parmusi, tetapi partai ini dalam kendali pemerintah, sehingga tidak dapat diharapkan untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Kudeta yang dilakukan oleh John Naro dan Imran Kadir atas kepemimpinan Jarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun

sebagai ketua dan sekretaris Parmusi, yang mendapatkan dukungan penuh dari ABRI, merupakan bukti sejarah yang sulit dibantah. Naro-Imran tidak lama memimpin Parmusi, karena turun SK Presiden No.77/1970 mengangkat MS Mintaredja dan Sulastomo sebagai ketua dan sekretaris partai. Karena diangkat oleh pemerintah, maka duet pimpinan ini akan selalu sejalan dengan garis kebijakan pemerintah, dan ada usaha untuk selalu menyenangkan pemerintah. Kebijakan partai yang menyatakan “kemenangan Golkar adalah kemenangan Parmusi”<sup>7</sup> adalah kebijakan yang sangat kontroversial di tengah-tengah umat Islam. Melihat kebijakan ini, maka wajarlah kalau Parmusi dalam pemilu 1971 hanya mendapatkan suara 7,4 %.

Peserta pemilu mulai tahun 1977 sampai dengan 1997, hanya diikuti oleh 3 parpol, yakni Golkar, PPP dan PDI. Ketiga partai ini yang berideologi Islam hanyalah PPP, yang merupakan hasil fusi dari Parmusi, NU, PSII dan Perti pada tahun 1973. Fusi atau penyederhanaan partai ke dalam kelompok sekuler, spiritual dan kekaryaan memiliki dua tujuan, yakni (1) untuk jangka pendek, dalam rangka mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan dalam menghadapi pemilu; dan (2) untuk jangka panjang, bahwa penyederhanaan partai ini telah sesuai dengan ketetapan MPRS No.XXII/MPRS/1966.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Machrus Irsyam, bahwa penyederhanaan partai pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, memiliki tiga tujuan, adalah (1) pergantian lembaga politik lama ke lembaga politik baru; (2) pembatasan yang jelas peran lembaga politik dan non-politik, dan (3) perubahan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru.<sup>9</sup> Bambang Pranowo menyatakan bahwa tujuan penyederhanaan partai adalah (1) agar mempermudah kampanye pemilu; dan (2) mempermudah sistem administrasi, seperti penyusunan fraksi di DPR,

bukan untuk melenyapkan partai-partai itu sendiri.<sup>10</sup> Apapun tujuan penyederhaan ini, yang jelas semua itu tidak lepas dari sistem politik orde baru yakni pembangunan dalam bidang ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Ekonomi akan berjalan dengan baik, pemodal asing akan senang menanamkan sahamnya di Indonesia kalau ada stabilitas politik. Ukuran stabilitas politik adalah tidak ada gejolak dan demonstrasi, pertentangan ideologi, dengan bahasa lain, terjamin keamannya.

Rupanya pemerintah Orde Baru belum puas kalau hanya menyederhanakan jumlah partai menjadi 3 partai saja, karena ketiga partai itu memiliki ideologi yang berbeda, padahal ideologi memiliki resistensi menimbulkan konflik. Kalau konflik horizontal terjadi, maka pertanda stabilitas politik terganggu. Dengan dasar itulah, semua partai politik harus satu ideologi, yakni Pancasila. Kehendak pemerintah ini tidak ada yang berani melawan, bahkan Nahdhatul Ulama (NU) sekalipun, menerima pancasila sebagai ideologi organisasi sebelum menjadi undang-undang negara yang tertuang dalam UU No.8/1985. Nahdhatul Ulama dalam muktamarnya di Situbondo tahun 1984,<sup>11</sup> yang kemudian dikenal dengan NU kembali ke khittah.1926, menerima pancasila sebagai asas tunggal, dan menyatakan NU tidak berpolitik praktis, sehingga dengan resmi keluar dari PPP. Partai-partai di Orde Baru tidak ubahnya “sistem kepartaian setengah partai” begitu Deliar Noer menyebutnya.<sup>12</sup> Bagaimana tidak? kalau PPP dan PDI hanya sebagai organisasi sosial politik pelengkap dan pemanis dari keberadaan Golkar, yang ditempatkan sebagai *singel majority*. Selain itu juga agar kelihatan demokrasi berjalan dengan baik, karena ada beberapa partai politik, padahal sesungguhnya hanya demokrasi semu.<sup>13</sup> UU No.8/1985 jelas-jelas mengekang kebebasan partai politik dalam menganut ideologi, padahal perubahan asas membawa perubahan dalam kinerja dan daya

tarik umat Islam. Semua partai sudah tidak ada perbedaan yang prinsipial, karena semuanya berazaskan Pancasila. Dua partai politik (PPP dan PDI) kesulitan menarik massa, dan sudah tidak ada lagi yang dijual kepada rakyat, maka logislah kedua partai ini kalah sebelum pemilu. Larangan mengkritik pemerintah dan semua kebijakannya, dilarang berbicara tentang Pancasila dalam setiap kampanye, bahkan tidak jarang juru kampanye harus diturunkan dari mimbar oleh pihak kepolisian, karena dianggap mengkritik pemerintah. Kebebasan berbicara betul-betul dibelenggu, padahal yang bicara itu memiliki data dan fakta yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Begitu juga kebebasan akademik juga dibelenggu, hasil-hasil penelitian yang mengkritik kebijakan politik Orde Baru dan menyinggung bisnis keluarga Cendana, akan berhadapan dengan penegah hukum, dan hasil penelitiannya tidak boleh beredar, kalau sudah dalam bentuk buku, Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan, dan harus ditarik dari peredaran.

Kekalahan partai-partai politik Islam sejak 1955 sampai dengan 1997 kalau dipetakan ada dua faktor, yakni faktor internal umat Islam dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal umat Islam sebagai penyebab kekalahan dalam pemilu sehingga tidak dapat berkuasa, karena (1) teologis, sebagian mengatakan bahwa politik itu kotor, sedangkan Islam itu bersih, yang kotor dan bersih tidak dapat disatukan, sehingga kedua wilayah ini harus dipisahkan, maka walaupun beragama Islam tidak memilih partai yang beridentitas Islam; (2) sosiologis, umat Islam mayoritas masih berada pada garis “abangan”, miskin, bodoh dan terbelakang, sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi untuk memilih partai non-Islam; (3) politis, diterapkan kebijakan massa mengambang—floating mass—, tidak diperbolehkan partai non-Golkar untuk mengadakan pembinaan sampai ke tingkat desa, sehingga

yang mereka pahami hanya Golkar saja; (4) psikologis, yakni diciptakan rasa takut di masyarakat kalau tidak mendukung partai pemerintah, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Birokrat dari pusat sampai desa dan ABRI menjadi ujung tombak untuk menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada keluarga dari PNS mengikuti kampanye PPP atau PDI, maka PNS tersebut dipanggil atasannya untuk diinterogasi dan ditakut-takuti. Belenggu psikologis begitu mencekam selama lima kali pemilu, dan umat Islam tidak dapat berlutut apa-apa menghadapi sistem politik, maka kekalahan demi kekalahan menjadi bagian dari kehidupan berpolitik umat. Selain itu dapat juga dijelaskan bahwa kekalahan politik Islam itu disebabkan (1) partai-partai Islam yang mengusung ideologi agama tidak dapat menjabarkan dalam bentuk program partai yang dapat dilaksanakan secara kongkrit, sehingga umat akan tertarik dengan program itu; (2) konflik internal partai yang menghabiskan energi dan pemikiran, sehingga tidak fokus pada kegiatan menyejahterakan umat; (3) kesenjangan antara tataran normatif-teologis ajaran Islam dengan perilaku yang ditampilkan oleh elit politik dan partai Islam; (4) elit politik tidak mampu melihat perubahan masyarakat yang begitu cepat, ada perubahan orientasi berpikir rakyat dari pola berpikir tahun 1950 dengan pola berpikir tahun 2000-an.

*Kedua*, faktor eksternal, yakni adanya perubahan sistem politik dari orde Baru ke orde Reformasi, sehingga ada keinginan untuk meraih kemenangan bagi partai politik Islam diharapkan muncul setelah Soeharto lengser dengan dikuburnya sistem politik Orde Baru,<sup>14</sup> dan munculnya sistem demokrasi yang sesungguhnya. Keras kebebasan telah dibuka, elit politik ramai-ramai untuk mendirikan partai politik, tidak kecuali elit muslim dan ormas Islam juga ada yang tergiur. Peserta pemilu tahun 1999 sampai dengan 2009, bermunculanlah

partai-partai bagaikan jamur di musim hujan, bahkan jumlah partai Indonesia terbanyak di dunia.<sup>15</sup> Semua partai politik kalau dipetakan dari aspek keberadaannya ada 3 kelompok, yakni (1) partai lama, misalnya Golkar, PPP dan PDI; (2) partai lama dengan wajah baru, misalnya Masyumi Baru, Partai Syarikat Islam; (3) partai pecahan dari partai lama, misalnya Partai Bintang Reformasi (PBR), PDI Perjuangan; dan (4) partai baru, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Di bawah ini tabel yang menjelaskan fragmentasi partai-partai yang merupakan pecahan dari partai yang hidup pada orde Baru, yakni Golkar, PPP dan PDI adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Pecahan Partai Orde Baru

Sumber: Diolah dari KPU dan Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas, 2004.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pecah menjadi dua partai pada pemilu 1999, kemudian menjadi dua partai pada pemilu 2004, dan kembali pecah menjadi tiga partai pada pemilu 2009, semuanya tidak pernah

meraih suara yang signifikan. Padahal PPP sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik umat Islam, lantas timbul pertanyaan, kemana larinya suara umat Islam? Pertanyaan ini dengan mudah dapat dijawab kalau diletakkan dalam bingkai sistem politik orde baru, adalah (1) Golkar sebagai partai pemerintah memiliki network sampai ke desa-desa, sehingga dengan mudah memobilisasi massa untuk meraih suara; (2) umat Islam yang menjadi PNS memiliki tugas untuk memenangkan Golkar, dengan cara menggolkarkan keluarganya baik yang *nuclear family* maupun yang *extended family*; (3) untuk mewadahi umat Islam dibentuklah majlis taklim di tingkat desa, sebagai tempat pengajian ibu dan bapak; dan (4) para pemudanya dibuatkan wadah yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sedangkan untuk lembaga pendidikan diwadahi dalam Majelis Dakwah Islamiyah (MDI).

Keberadaan PPP ditengah sistem politik Orde Baru ibarat “ada tapi tidak ada—*wujuduhu ka’adamihī*”, sehingga kalau selalu kalah dalam setiap pemilu, memang diciptakan untuk kalah, dan tidak ada ruang sedikitpun untuk menang. Tabel di bawah ini menjelaskan perolehan suara PPP sejak orde baru sampai pemilu 2009 kemarin.

Tabel 3

Perolehan Suara PPP Tahun 1977-2009

*Sumber:* Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

Kalau diperhatikan tabel di atas, perolehan suara PPP tidak pernah mencapai 30 %, paling tinggi 29,3 % tahun 1977, setelah itu terus merosot, bahkan yang paling tragis pada pemilu 2009, hanya memperoleh 5,3 %. Perolehan suara 1977 ini mendapatkan angka tertinggi dalam sejarah keberadaan PPP, hal ini dapat dijelaskan bahwa (1) umat Islam dan elit muslim masih ada ghirah berpolitik; (2) ada harapan dengan difusikan menjadi satu partai, kekuatan politik Islam menjadi solid; (3) belum ada perpecahan partai-partai yang difusikan; dan (4) lambang Ka’bah masih menjadi daya tarik umat. Zainuddin MZ, Rhoma Irama misalnya, Ka’bah dijadikan landasan mendukung PPP dan hampir semua juru kampanye PPP menjadikan Ka’bah sebagai tema kampanye. Namun sayang, solidnya kekuatan politik Islam ini tidak berumur panjang, setelah beberapa kepentingan politik masing-masing unsur tidak terakomodasi dalam PPP. NU sebagai salah satu unsur dalam PPP dan memiliki massa pendukung yang besar, akhirnya keluar dari PPP bahkan menggembosi, sehingga suara yang diperoleh PPP pada pemilu tahun 1987 turun tajam, hanya mendapat 16 %, padahal pada pemilu tahun 1982 mendapatkan suara 27,8 %, berarti turun 11 %.<sup>16</sup> Keluarnya NU dari partai politik ini untuk kedua kalinya, pertama sewaktu keluar dai Masyumi dan berdiri sebagai partai politik sendiri, dan kedua keluarnya NU dari PPP.

Kekalahan politik Islam yang dipresentasikan oleh PPP, bukan menjadi pelajaran bagi elit muslim, bahkan dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, elit muslim ramai-ramai mendeklarasikan partai Islam. Pendirian partai Islam ada yang mencantumkan ideologi Islam, namun ada juga yang tidak mencantumkan, tetapi yang di-bidik jadi konstituennya adalah tetap umat Islam. Kehadiran partai-partai Islam, dengan

klaim partainya sebagai partai yang akan mengusung perubahan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, ternyata tidak dapat memenangkan kompetisi merebut suara rakyat. Dalam bentangan sejarah yang panjang, politik Islam tidak pernah memperoleh suara yang signifikan kalau dihubungkan dengan jumlah umat Islam yang cukup besar.

Partai Islam pendatang baru yang didukung oleh aktivis kampus seperti Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 hanya mendapat suara 1,4 % di bawah PBB dengan jumlah 1,9 % suara, sehingga kedua partai ini tidak lulus electoral treshold atau parliamentary treshold yang mensyaratkan 2,5 %. Pada pemilu 2004 harus merubah namanya, kalau ingin menjadi peserta pemilu, maka PK berubah menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PBB tetap dengan nama PBB, hanya singkatannya berbeda, Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan. Kalau memakai ukuran electoral treshold, maka partai Islam yang melenggang ke gedung DPR pada tahun 1955 ada 3 partai (Masyumi, NU dan PSII) dari 6 partai, tahun 1971 hanya ada 2 partai (NU dan Parmusi) dari 4 partai, tahun 1977-1982 hanya ada 1 partai yakni PPP, satu-satunya partai Islam, tahun 1987-1997 tidak ada partai Islam yang ada di DPR, karena PPP bukan sebagai partai Islam, dengan alasan azasnya tidak lagi Islam tetapi Pancasila. Sedangkan pada tahun 1999 yang lolos hanya PPP saja dari 17 partai Islam, tahun 2004 ada 3 partai yakni PPP, PKS dan PBR dari 5 partai Islam, pada pemilu 2009 hanya ada 2 partai yakni PPP dan PKS dari 7 partai Islam yang ikut pemilu.

Data-data di atas sekali lagi bukan dijadikan bahan introspeksi elit muslim yang terjun ke bidang politik, melainkan justru dijadikan pemicu untuk lebih banyak mendirikan partai politik. Mungkin pola berpikinya, siapa tahu dengan bertambahnya partai politik Islam

akan semakin menambah jumlah suara, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pemilu 1955 lah yang memperoleh jumlah suara yang mengembirakan, walaupun tidak dapat menembus angka 50 %, setelah itu tidak pernah dapat menyamai suara yang diperoleh tahun 1955. Lebih tragis lagi pemilu 2009 ini, hanya PPP dan PKS yang memenuhi *parliamentary threshold*, itupun kalau digabung hanya 13,2 %. Padahal PKS diprediksi akan memperoleh suara 20 %, minimal 12-15 % menurut Hidayat Nur Wahid, ketua MPR dan mantan Presiden PKS.<sup>17</sup> Begitu juga perjalanan partai yang memiliki basis massa Islam, dan sering dihubungkan dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>18</sup> Kehadiran dua partai ini semula diprediksi menjadi partai besar yang mewakili kelompok Islam modernis dan tradisional dan akan dapat mewarnai per-caturan politik nasional, namun ternyata prediksi itu mleset. Kelompok Islam modernis dan tradisional merupakan kelompok Islam terbesar di Indonesia, sehingga prediksi tersebut sesungguhnya rasional. Tetapi data berbicara lain, justru yang benar adalah prediksi dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang diketuai Denny JA. Menurutnya, partai politik (parpol) yang akan mendapat suara di atas 12 % hanya partai, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan, sebagaimana hasil pemilu 2009 yang resmi diumumkan oleh KPU pada hari Sabtu 9 Mei 2009 jam 22.00 WIB, berikut ini:

Tabel 4  
Partai Lolos *Parliamentary Threshold*  
Pemilu 2009



*Sumber:* KPU, dimuat dalam *Republika*, Ahad, 10 Mei 2009, hlm. 1.

Prediksi LSI, PKS akan menempati posisi tengah, tetapi suaranya kurang dari 12 %, maka berdasarkan data di atas, PKS hanya dapat memperoleh 8.206.955 (7,9 %) suara dari total suara yang sah 104.099.785, suara yang tidak sah ada 17.488.581. Jumlah pemilih 171.265.442 (dalam negeri 169.789.595, luar negeri 1.475.847), golput 49.699.076,<sup>19</sup> sehingga pemilu 2009 hanya diikuti 60 % dari jumlah pemilih. Pendatang baru yang ikut pemilu dan memperoleh suara yang cukup bagus adalah partai Gerindra dan Hanura, walaupun jumlah suaranya dibawah PKS, PAN, PPP dan PKB, namun berani dan diperhitungkan oleh partai lain untuk mendampingi menjadi cawapres. Sementara partai yang menempati urutan 4 – 7 tidak dilirik, bahkan ada kesan ditinggalkan. PKS menyodorkan nama Hidayat Nur Wahid untuk mendampingi SBY, PAN menyodorkan Hatta Rajasa dan AM Fatwa, sedangkan PKB mengusung Muhaimin Iskandar, namun nama-nama ini tidak menjadi nominasi. Lucunya, tokoh nasional sekaliber Amien Rais yang mengusulkan Hatta Rajasa untuk menjadi cawapres mendampingi SBY, malah dijadikan kurir oleh SBY untuk mendekati PDIP, dan akhirnya menjadi ketua tim sukses SBY. Sesungguhnya telah terjadi “pelecehan politik

internal partai”, karena partai yang berkoalisi dan mendapatkan suara yang tidak kecil, akhirnya hanya menjadi tim sukses, padahal dinominasikan menjadi cawapres dan didukung oleh DPW PAN se-Indonesia, kecuali DPW PAN Jawa Timur.

PAN dan PKB yang menyatakan dirinya sebagai partai inklusif, dengan harapan meraup suara dari semua lapisan masyarakat, termasuk Tionghoa, tidak mendapat suara sesuai yang diinginkan, bahkan jauh dari harapan. Tabel di bawah ini semakin jelas menggambarkan peroleh suara dalam setiap pemilu yang diikuti dalam 3 pemilu di era reformasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Perolehan Suara PAN dan PKB Tahun  
1999-2009

*Sumber:* Diolah dari Komisi Pemilihan Umum  
PAN ikut pemilu yang pertama pada tahun 1999 dengan perolehan suara 7,1 %, semula memprediksi akan mendapat suara sekitar 25 %, dengan asumsi suara dari warga Muhammadiyah sekitar 20 juta, lainnya dari mahasiswa, kalangan profesional, dan masyarakat pada umumnya. Seorang tokoh reformasi Indonesia dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, belum menjadi daya pikat masyarakat untuk

menjatuhkan pilihan. Perolehan suara pada pemilu berikutnya, 2004, justru menurun 1,3 %, menjadi 6,4 %, kemudian menurun lagi pada pemilu 2009, karena hanya meraup suara 6,0 %, kehilangan 1 juta suara. Hal ini agak berbeda dengan perolehan suara PKB di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang memperoleh cukup signifikan dengan jumlah massa NU, yakni 12,6 %. Pada pemilu 2004 menurun menjadi 10,6 %, kemudian pada pemilu 2009, merosot jauh karena hanya mendapatkan 4,9 suara. Menurunnya suara PAN dari pemilu ke pemilu bisa jadi dikarenakan (1) ada ketakutan di masyarakat abangan untuk memilih PAN, karena ada anggapan partai ini akan menerapkan syariat Islam secara ketat; (2) terlalu mengandalkan suara dari warga Muhammadiyah, karena sering menggunakan pendekatan struktural lewat birokrasi Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Ranting, mengingat Amien Rais tokoh Muhammadiyah; (3) tidak ada budaya feodalistik dalam tubuh Muhammadiyah, sehingga model intruksi dari pusat ke bawah tidak dijumpai; (4) warga Muhammadiyah sudah cerdas dalam politik, dan telah lama menerapkan “politik menyebar” ke berbagai partai politik; dan (5) azas pancasila yang dijadikan azas partai tidak memiliki daya tarik dari pemilih, karena sudah dianggap PAN menjadi partai sekuler. Sedangkan menurunnya perolehan suara PKB dari pemilu ke pemilu dapat dijelaskan, (1) konflik internal PKB yang berlarut-larut, karena begitu kuatnya posisi Gus Dur, sehingga dengan mudah dan tanpa prosedur partai memecat pimpinan PKB;<sup>20</sup> (2) suara warga NU tidak menyatu, karena kyai-kyai NU yang terjun ke politik menyebar ke berbagai partai politik, misalnya di PPP dan Golkar, para kyai ini memobilisasi massa NU untuk memilih partainya; (3) kalangan terpelajar NU telah membuka mata dan hati dalam bidang politik, sehingga kelompok ini tidak dapat diarahkan ke salah satu partai politik saja.

## Fragmentasi Politik Islam

Fragmentasi gerakan Islam dalam beberapa bidang berimbas dalam kehidupan politik, sehingga terjadi fragmentasi politik. Menurut analisis Dhuroruddin Mashad, fragmentasi politik terjadi setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni (1) perbedaan interpretasi nilai; (2) persaingan kepentingan; dan (3) kedenderungan dari pemaknaan kepentingan umum.<sup>21</sup> Lahir dan berkembangnya gerakan politik Islam di dunia Islam, misalnya *Hizbullah* di Lebanon,<sup>22</sup> Hamas dan Fatah di Palestina,<sup>23</sup> FIS di Al-Jazair,<sup>24</sup> PAS di Malaysia,<sup>25</sup> *Islamic Action Front* di Yordania, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Mindanau Philipina<sup>26</sup> dan beberapa gerakan politik Islam lainnya, lebih disebabkan adanya kepentingan politik yang berbeda dikalangan umat Islam. Dalam setiap pemilunya partai-partai ini tidak pernah memperoleh suara yang cukup signifikan, walaupun toh menang sering menimbulkan konflik baru dengan partai Islam lainnya. Semua partai Islam di dunia Islam itu mengambil bentuk gerakan yang fundamental dan radikal, karena masih ada yang menginginkan terbentuknya Negara Islam. Menurut Bassam Tibi, mengutip pendapatnya Mark Juergensmeyer dalam bukunya “*The New Cold War? Religious Rationalism Confronts the Secular state*” bahwa tatanan dunia baru yang menggantikan kekuatan-kekuatan bipolar Perang Dingin masa lalu tidak hanya dicirikan munculnya kekuatan ekonomi baru, hancurnya negara-negara kuno, dan melemahnya komunisme, tetapi juga ditandai bangkitnya identitas parokial yang didasarkan pada etnis dan kesetiaan agama.<sup>27</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia, partai-partai Islamnya mengalami hal yang serupa dengan negara Islam di dunia ini. Sebagaimana dipaparkan di atas, sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai

yang terakhir tahun 2009, partai Islam selalu kalah. Tetapi sekali lagi sejarah kekalahan ini tidak dijadikan introspeksi untuk tidak mengalami kekalahan kembali, sebaliknya ramai-ramai untuk mendirikan partai baru. Peristiwa 21 Mei 1998 dengan lengsernya Soeharto yang digantikan oleh BJ Habibie, kran kebebasan terbuka luas, elit muslim dan bergerak dalam bidang politik pada mendirikan partai Islam. Kehadiran partai Islam mendapat tanggapan, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Kuntowijoyo, budayawan yang jernih dan tajam pemikirannya, tidak setuju umat Islam ikut ramai-ramai mendirikan partai politik Islam. Ada enam alasan yang dapat dikemukakan, yakni (1) terhentinya mobilitas sosial; (2) disintegrasi umat; (3) umat menjadi miopis; (4) pemiskinan; (5) runtuhnya proliferasi; dan (6) alienasi generasi muda.<sup>28</sup> Pemikiran ini didasarkan bahwa pendirian partai politik tidak didasarkan pada struktur budaya dan struktur sosial sekaligus, karena pada umumnya partai baru hanya terlibat dalam struktur budaya dan struktur teknik, atau struktur sosial dan struktur teknik. Ada partai hanya berdasarkan struktur teknik saja. Hanya partai agama yang memiliki struktur budaya, sosial dan teknik,<sup>29</sup> ketiga struktur digambarkan seperti berikut ini:

Azyumard Azra juga termasuk yang tidak setuju elit Islam mendirikan partai Islam, alasannya adalah pendirian partai Islam itu hanya

keinginan elit politik muslim untuk mendapatkan kekuasaan, daripada panggilan agama.<sup>30</sup> Pernyataan ini memang terbukti dalam tataran empiris, berdirinya partai Islam karena ketokohan elit politik sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Misalnya pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lepas dari sosok Amien Rais, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Abdurrahman Wahid, Partai Bulan Bintang (PBB) melekat dengan Yusril Ihza Mahendra. Ternyata tidak hanya partai Islam saja yang dijadikan kendaraan bagi pendirinya, pendirian partai lainnya juga sebagai kendaraan politik pendirinya untuk meraih kekuasaan, sebut saja Partai Demokrat (PD) yang menyatu dengan Susilo Bambang Yudoyono bahkan nama Ketua Umum PD tenggelam, hal ini juga dialami oleh Partai Gerindra, publik lebih mengenal Prabowo Subianto dibanding ketua partainya.

Ada juga alasan lain tidak setuju mendirikan partai Islam, yakni ketakutan partai Islam itu memiliki agenda politik mendirikan negara Islam,<sup>31</sup> yang pernah gagal beberapa kali diperjuangkan. Padahal indikasi mendirikan negara Islam itu telah muncul ke permukaan dengan keinginan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, yang disampaikan oleh PPP, terlepas apakah sungguh-sungguh atau hanya menarik simpati massa Islam fundamentalis.

Selain ada yang tidak setuju mendirikan partai politik Islam, ada juga yang setuju bahkan kelompok ini yang mayoritas, karena setiap deklarasi partai selalu dihadiri oleh umat Islam. Bahkan Nurcholish Madjid yang pernah melontarkan slogan "Islam Yes, Partai Islam No!" memberikan dukungan untuk mendirikan partai Islam. Menurutnya, politik adalah bentuk ekspresi yang paling tepat, terutama pasca Orde Baru.<sup>32</sup> Oleh karena itu elit muslim ramai-ramai mendirikan partai Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pendirian partai politik Islam pada era reformasi dapat dipetakan dalam 3

tipe partai, yakni (1) partai orde lama yang muncul kembali dengan nama yang mirip sama; (2) partai orde baru yang muncul dengan nama yang mirip sama; dan (3) partai yang betul-betul baru, seperti dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 7  
Partai Politik Islam Orde Lama Muncul Kembali

Sumber: Diolah dari *Komisi Pemilihan Umum*. Tim Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas, 2004. Geoff Forrester (ed.), *Post Soeharto Indonesia? Renewal or Chaos*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies, 1999, hlm.185.

Romantisisme kejayaan masa lalu masih sangat kuat di hati elit dan umat Islam, dengan dasar berpikir bahwa partai-partai Islam yang pernah memperoleh suara pada pemilu 1955 dianggap sebagai prestasi, sehingga hal serupa akan dapat terjadi pada pemilu orde reformasi. Lahirlah nama-nama partai yang mirip bahkan sama dengan yang lalu, dan itu dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik massa. Mereka lupa bahwa kejayaan masa lalu itu merupakan kekalahan politik, karena politik Islam tetap kalah dibanding politik sekuler. Nama Masyumi, Syarekat Islam, NU tidak laku dijual di era yang telah berubah, perolehan suara yang dahulu tidak akan pernah sama dengan perolehan masa kini. Munculnya partai politik Islam yang baru,

baik yang menjadi peserta pemilu maupun yang tidak dapat ikut pemilu, karena tidak lolos administrasi, hanya akan membuat “kekalahan baru”, sehingga partai Islam akan semakin terperosok. NU yang memiliki warga sangat besar tidak akan dapat memenangkan pemilu, sewaktu masih solid dalam satu partai saja kalah dengan partai lain, apalagi setelah terjadi fragmentasi politik dengan berdirinya partai politik baru didirikan oleh elit NU. Ada enam partai di lingkungan NU yang semuanya mengandalkan suara dari warga NU, melalui Pengurus Besar NU dan Kyai-kyai pesantren. Memang menurut teori teori struktur yang dikemukakan Kuntowijoyo, NU kalau mendirikan partai politik memenuhi struktur budaya, struktur sosial dan struktur teknik, namun teori ini tidak ada hubungannya dengan kesatuan orientasi politik umat. Berdasarkan Survei Kompas (Maret 2009), terjadi penyebaran suara warga NU ke beberapa partai politik, yakni (1) 29,8 % ke Partai Demokrat—PD—; (2) 19,4 % ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan —PDIP--; (3) 16,3 % ke Partai Golongan Karya—Golkar—; (4) 7,1 % ke Partai Demokrasi Pembaharuan—PDP—; (5) 6,8 % ke Partai Keadilan Sejahtera—PKS--; (6) 5,9 % ke Partai Kebangkitan Bangsa—PKB--; dan (7) 1,3 % ke Partai Kebangkitan Nasional Ummat—PKNU.<sup>33</sup> Hasil survei ini dilakukan sebelum pernyataan Gus Dur melalui Yenni Wahid, PKB Pro Gus dur yang mengajak konstituennya menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Gerindra, sehingga suara warga NU yang ke Gerindra belum masuk dalam survei Kompas tersebut. PKB pimpinan Muhaimin pada pemilu 2009 mendapatkan suara 4,9 % lebih rendah 1 % dari hasil survei Kompas, kemungkinan hal ini terjadi karena pengembosan yang dilakukan oleh Gus Dur dan anaknya, sehingga suara PKB tidak sampai 5 %.

Fragmentasi politik Islam juga terjadi

pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dikarena konflik internal partai yang akhir-nya melahirkan partai baru, misalnya PPP Reformasi, Partai Persatuan, Partai Bintang Reformasi, seperti dalam tabel ini

Tabel 8  
Partai Politik Islam Orde Baru Muncul Kembali

*Sumber:* Diolah dari *Komisi Pemilihan Umum*.

Dari keempat partai pecahan dari PPP yang dapat mengikuti pemilu adalah PPP dan PBR, sementara PPP Reformasi dan Partai Persatuan harus mengubur dalam-dalam untuk mendapatkan simpati dan suara umat Islam, karena kedua partai ini tidak dapat mengikuti pemilu. Pada pemilu 2004 dan 2009, PBR dan PPP dapat mengikuti pemilu, dan mendapatkan suara walaupun tetap saja kalah dibanding dengan partai lain. Pada pemilu 2004, PBR mendapatkan suara 2,4 % dan PPP mendapatkan 8,2 % suara, sedangkan pada pemilu 2009, PBR sekitar 2 % suara, PPP memperoleh 5,3 % suara. Data ini menunjukkan peroleh suara politik Islam pada pemilu 2009 tidak lebih baik dibanding 2004.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pendatang baru di era reformasi cukup memperoleh simpati umat Islam, karena partai ini selain berazaskan Islam juga menampilkan perilaku Islami oleh konstituentnya. Memang pada pemilu 1999, yang masih bernama Partai Keadilan (PK) hanya mendapatkan 1,4 % suara sehingga tidak lolos *electoral threshold*, namun setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu

2004 meraup 7,3 %, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada pemilu 2009, PKS memperoleh 7,9 % suara, ada kenaikan 0,6 %, jauh dari target yakni 20 %. Dengan bertambahnya PKS menjadi partai Islam semakin banyak jumlah partai politik Islam, sehingga semakin fragmentatif.

Deliar Noer menginginkan adanya kesatuan partai, maka didirikan Partai Umat Islam (PUI). Spiritnya seperti Masyumi, yakni sebagai satu-satunya partai untuk menyalurkan aspirasi politik Islam, namun yang terjadi malah sebaliknya, partai Islam bukan bersatu, malah bercerai berai. Selain itu, PUI dalam pemilu 1999 hanya mendapat kepercayaan umat yang memilihnya 0,3 %, berarti tidak lolos *electoral threshold*. PUI tahu diri kekuatan yang dimiliki, sehingga pemilu berikutnya tidak merubah namanya untuk dapat lolos administrasi sehingga dapat mengikuti pemilu. Walaupun akan diganti nama apapun tetap tidak akan mendapatkan simpati umat, karena umat juga telah jenuh begitu banyaknya partai Islam.

### **Dari Ideologis ke Pragmatis**

Islam ideologis<sup>34</sup> dalam sejarah perpolitikan di Indonesia tidak pernah menang, walaupun jenis Islam ideologis telah memainkan peran dominan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menumpas gerakan komunisme yang dikenal dengan nama G.30 S/PKI tahun 1965. Saat gencar-gencarnya menyukseskan program Keluarga Berencana (KB), Islam ideologis dijadikan ujung tombak untuk mendakwahkan kepada masyarakat akan pentingnya program tersebut. Mubaligh, kyai dan ulama dalam setiap ceramahnya selalu mengambil tema tentang pentingnya Keluarga Berencana, dengan penekanan dua anak saja cukup, lelaki atau perempuan sama saja. Umat Islam itu didekati oleh pemerintah kalau sedang dibutuhkan, setelah tidak dibutuhkan ya buang begitu saja, tidak diperhatikan bahkan selalu

dipinggirkan.

Dikatakan umat Islam tidak pernah menang dalam memperjuangkan Islam ideologis, karena usaha untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi negara menemui jalan buntu dan akhirnya ditolak. Usaha melalui partai politik Masyumi, juga mengalami kekalahan dalam pemilu 1955, dan akhirnya partai ini dibubarkan melalui dekret Presiden 1959. Lebih-lebih pada era Orde Baru, Islam ideologis tidak berkutik sama sekali, maka ada keputusan umat Islam untuk mengembangkan Islam di Indonesia melalui jalur struktural, diambillah jalur kultural melalui dakwah amar makruf nahi munkar dan pemberdayaan masyarakat. Kembalinya NU ke khittah 1926 sebagai jam'iyah diniyyah, salah satu sebabnya adalah ketidakberhasilan mengambil jalur struktural atau jalur politik praktis.

Sesungguhnya ada secercah harapan akan kemenangan Islam ideologis pada Sidang Umum MPR 2000 sewaktu proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Gema shalawat dan takbir membahana di ruang sidang, tatkala Ketua MPTR, Amien Rais, mengetukkan palu terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Sejarah baru terukir, seorang santri dapat menjadi presiden, ini memecah kebekuan politik yang selama ini selalu dimenangkan oleh peserta pemilu yang mendapat suara terbanyak. Selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar, sehingga yang menjadi presiden selalu dari Golkar, yakni Soeharto. Logika ini rupanya tidak lagi berlaku pada era reformasi, karena pada pemilu 1999, PDIP menjadi pemenang pemilu, sehingga logika politik mestinya PDIP yang menjadi presiden, yakni Megawati. Amien Rais menggagas kekuatan alternatif, yakni Poros Tengah, yang didukung oleh partai-partai Islam, partai berbasis massa Islam, dan partai yang menghendaki ada perubahan mendasar

dalam tata politik dan tata kehidupan masyarakat masa depan, maka diajukan calon alternatif, yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tampilnya Gus Dur merupakan kemenangan Islam ideologis, tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan kinerja dan prestasi kerja yang dapat membawa rakyat kepada kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang sehat, stabilitas politik yang memadai, dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada periode kepemimpinan santri ini yang dikembangkan oleh politik suudzon, berprasangka yang tidak baik kepada sebagian anggota rakyat. Karakter kepemimpinan Kyai di kalangan NU atau yang menempatkan dirinya sebagai Kyai itu otoriter, kebenaran hanya ada pada dirinya, dan ini kultur di pesantren, bahwa kyai dapat menentukan segalanya, dan apa yang dikatakan kyai itu suatu kebenaran. Begitu juga yang terjadi pada diri Gus Dur, walaupun beliau seorang pluralis, demokratis dan selalu memperjuangkan nasib yang tertindas, pada saat berkuasa kultur pesantren yang telah membentuk kepribadiannya akan muncul kembali, lebih-lebih pada suasana yang mendorong karakter itu muncul ke permukaan. Dengan tidak hormat Gus Dur harus diturunkan dari kursi presiden oleh Sidang Istimewa MPR, dan digantikan oleh Megawati selaku wakil presiden.

Secara idealis pemilu 2004 akan dijadikan ajang tampilnya Islam ideologis dengan menampilkan politik santri untuk menjadi presiden atau wakil presiden, muncul nama Amien Rais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, dan Shalahuddin Wahid. Empat santri ini, tiga dari kalangan Islam tradisional dan orang yang berpengaruh di Nahdhatul Ulama, bahkan Hasyim Muzadi sebagai ketua PB NU, dan satu dari kalangan Islam modernis, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun ternyata tidak ada satupun yang lolos pada putaran pertama pemilihan presiden, karena

hanya memunculkan dua calon, yakni Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, dan dimenangkan oleh pasangan SBY-Kalla. Hal ini menandakan fragmentasi umat kembali terjadi, karena keempat santri tersebut secara politis terpisah, padahal sama-sama merebut suara dari umat Islam.

Rupanya berpijak dari sejarah, Islam ideologis atau Islam politik selalu saja kalah, maka pada pemilu 2009 tidak ada satupun calon dari kelompok santri politik, dan tidak ada wakil dari Islam ideologis yang tampil menjadi capres-cawapres. Pasangan Megawati-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono, dan pasangan Yusuf Kalla - Wiranto, merupakan simbol Islam abangan. Dikatakan simbol Islam abangan, karena ketiganya tidak memiliki basis pemahaman agama Islam yang memadai, bahkan dilihat dari riwayat pendidikan tidak ada satupun yang berasal dari lembaga pendidikan Islam, apalagi dari pesantren. Memang pasangan JK-Wiranto melalui penampilan istrinya kelihatan lebih Islamis dibanding pasangan yang lain, karena mengenakan busana muslimah. Dilihat dari sejarah keluarganya, Jusuf Kalla berasal dari kalangan NU karena bapaknya pendiri NU di Sulawesi Selatan, Ibunya adalah aktifis 'Aisyiyah, dan istrinya sendiri, Mufidah Yusuf Kalla dari keluarga Muhammadiyah, sehingga ada kepentingan dan analisis politik, kalau JK lebih mudah mendapat dukungan dari NU dan Muhammadiyah.<sup>35</sup> Muncul pertanyaan, apa kontribusi Jusuf Kalla kepada NU? dan apa kontribusi Mufidah JK kepada Muhammadiyah? Memunculkan sejarah keluarga Jusuf Kalla hanya salah satu strategi untuk meraih suara dari NU dan Muhammadiyah, dan strategi ini sah-sah saja, bahkan Boediono yang mendampingi SBY juga dikembangkan isu sebagai seorang muslim sejati yang pernah menjadi santri salah seorang

kyai Thariqah di Jawa Timur. Setiap pemilu umat Islam bak bidadari yang ingin didekati dan dimiliki oleh semua pasangan capres-cawapres, sehingga semua pasangan merapatkan diri ke umat Islam.

Kekalahan demi kekalahan membawa perubahan berpikir elit politik, yakni berpikir secara pragmatis sebagaimana yang dipertontonkan oleh partai Islam atau berbasis massa Islam yang lolos ke gedung DPR dalam pemilu 2009. PKS, PAN, PPP, dan PKB yang kalau dijumlahkan suara yang didapat ada 24,1 % melebihi suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat (20,85%), Partai Golkar (14,45 %), dan PDIP (14,03 %). Apalagi kalau dibandingkan dengan perolehan suara dari Partai Gerindra (4,46 %), dan Partai Hanura (3,77 %), gabungan empat partai tersebut jauh lebih besar. Namun mengapa justru keempat partai tersebut menjadi pendukung Partai Demokrat? Ini suatu pertanyaan besar yang harus dicarikan jawabannya. Dengan menggunakan filsafat ilmu dapat dijelaskan, bahwa *pertama*, secara ontologis umat Islam telah terfragmentasi ke beberapa partai politik, sehingga kalau empat partai tersebut mengajukan sendiri capres dan cawapres tidak akan menang, karena umat Islam telah merasakan kebijakan dan program-program dari pasangan presiden SBY dan Yusuf Kalla. Suara umat Islam mayoritas akan diberikan kepada SBY-Boediono dan ke JK-Wiranto, sementara yang ke Mega-Pro diperkirakan sedikit, karena pasangan yang terakhir ini tidak memiliki kontribusi kepada umat Islam bahkan sering merugikan umat Islam. *Kedua*, secara epistemologis, keempat partai Islam tersebut tidak memiliki dana yang cukup besar untuk promosi atau mem-bayar iklan di media elektronik, cetak dan media lainnya, sebagai metode untuk memenangkan pemilu. Dana pasangan capres-cawapres cukup besar, ketiga pasangan yang maju ke pilpres 2009 menyediakan dana kampanye di

atas 20 M, kecuali JK-Wiranto hanya 15 M lebih sedikit. Banyak metode untuk meraih suara dari masyarakat, yakni: (1) pencitraan diri, dengan menonjolkan keberhasilan selama menjadi pimpinan, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin profesi maupun pemimpin bangsa. Klaim keberhasilan menjadi pemimpin sebagai agenda kampanye.<sup>36</sup> Ini menjadi kelebihan dari capres SBY dan JK, karena keduanya masih memegang kekuasaan, sehingga apa yang telah dilakukan untuk mensejahterakan rakyat diklaim sebagai prestasi pribadinya. Selain itu pencitraan diri sebagai seorang muslim-muslimah yang baik, hal ini sebagai dikedepankan agar umat Islam percaya, bahwa pasangan yang maju ke pilpres itu seorang muslim yang baik, dan tidak memiliki track record yang jelek terhadap umat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan syariat Islam dengan baik, shalat lima waktu, puasa sunnah dan pakaian sebagai simbol kemusliman dan kemuslimahan selalu melekat dalam dirinya. Gemar mendatangi majlis taklim, rajin sowan kyai-kyai pesantren, dan ulama-ulama. Adapun yang ke (2) adalah program kerja, terutama program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Program ekonomi kerakyatan, penyediaan lapangan kerja yang luas, sekolah dan kesehatan gratis menjadi jargon kampanye.

Cabang filsafat ilmu yang *ketiga* adalah aksiologis atau nilai-nilai yang menjadi tujuan. Dalam politik itu yang akan dicapai adalah kekuasaan, maka tujuan keempat partai itu tidak lain adalah memperoleh kekuasaan, minimal wakil dari partainya ada yang menjadi menteri, sehingga kepentingannya nanti mudah untuk direalisasikan melalui menteri tersebut. Kalau ada rumor, sebagaimana telah disinggung di atas, PKS akan meminta jatah kursi, dilihat dari ilmu politik bukan hal yang aneh. Justru menjadi aneh kalau memberikan dukungan, tetapi tidak meminta imbalan apa-apa. Dengan demikian

jangkan mengharap ada idealisme politik dari partai-partai Islam, yang ada adalah kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah yang sering dilontarkan oleh politisi, bahwa dalam politik “tidak ada lawan abadi dan tidak ada kawan sejati”, yang ada adalah kepentingan (*interest*). Hal ini dapat untuk memahami sewaktu PKS (Zulkiflihamzah) dan Marisa Haque (dari PDIP) maju menjadi pasangan dalam pemilihan gubernur Banten. Secara logika dan ideologi politik dua orang ini tidak dapat ketemu, tetapi karena ada kepentingan bersama akhirnya dapat ketemu juga. Padahal di parlemen PDIP yang getol menolak RUU APP, sementara PKS getol memperjuangkan untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Menarik lagi, Marisa Haque setelah dikeluarkan dari PDIP, tidak bergabung dengan PKS, melainkan dengan PPP.

Faktor ideologi politik sekarang ini sudah mulai bergeser menjadi ideologi kepentingan, dan inilah politik yang berpikir jangka pendek. Membicarakan koalisi yang berpijak dari kesamaan ideologi sudah tidak relevan lagi. Menurut Azyumardi Azra, faktor yang menentukan adalah kepentingan-kepentingan politik untuk menggapai dan mendapatkan porsi dalam kekuasaan, yang masih terus dalam konstestasi. Perbedaan-perbedaan ideologis atau tepatnya ideologi politik yang merupakan *raison de’atre* masing-masing partai, terlihat terkesampingkan, menjadi tidak relevan.<sup>37</sup> Pergeseran ideologis ke pragmatis rupanya menjadi keharusan sejarah di era politik kontemporer ini, karena kalau tetap mempertahankan ideologi agama akan ditinggalkan oleh pemilih dan sudah tidak relevan lagi. Pergeseran ini memberikan dampak kepada rakyat yang setiap tahun memberikan hak untuk mengikuti pemilu, yakni juga berpikir pragmatis. Dalam pemilu 2009, uang menjadi salah satu faktor untuk menentukan pilihannya, selagi amplop yang berisi uang yang lebih besar, itulah yang dipilih.<sup>38</sup> Rupanya pola berpikir



pragmatis ini akan terus muncul dalam setiap pemilu, pilgub, dan pilkada. Banyak yang menyatakan pemilu sekarang ini (2009) seperti pemilihan kepala desa yang juga menggunakan uang untuk mencari pemilih, dan pemilih pun akan memberikan dukungan kepada calon yang isi amplopnya lebih besar.

### **Format Partai Islam Masa Depan**

Basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.<sup>39</sup> Tanpa kedua elemen ini sangat sulit suatu partai akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Islam sebagai ideologi partai yang formalistik sudah mulai ditinggalkan umat. Pertarungan Islam substansialistik dan Islam formalistik sudah tidak relevan lagi, maka kalau ada partai yang masih mengandalkan Islam sebagai ideologi politik harus ada rekonstruksi ulang pemaknaan Islam. Kesan Islam yang dipahami sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, menakutkan, dan kumuh, Islam harus menjadi dasar negara secara formalis, harus ditinggalkan, apalagi keinginan untuk mendirikan negara Islam. Ideologi Islam didasarkan pada pandangan tentang Islam sebagai agama yang bersifat universal.<sup>40</sup> Universalitas ini harus dijadikan pijakan untuk menebarkan keselamatan, kerahmatan dan kedamaian ke semua manusia, sehingga semua manusia merasakan kesejukan, keharmonisan dan kedamaian dalam berislam dan hidup berdampingan dengan umat Islam. Pemahaman yang semacam ini harus dijabarkan dalam bentuk aksi nyata yang terukur dalam program partai. Partai-partai yang semula bersikukuh dengan Islam formalis yang eksklusif, harus melakukan perubahan dan mengganti menjadi inklusif, sehingga menjadi partai terbuka. Dalam Rapat Kerja Nasional PKS di Bali berkembang keinginan dari kadernya, bahwa PKS lebih baik menjadi partai terbuka, yakni menerima calon legislatif dari

non-muslim. Keinginan sebagian kader ini, menurut Tifatul Sembiring sebagai presiden partai, adalah sesuatu yang wajar, mengingat untuk daerah bagian timur mayoritas adalah non-muslim.<sup>41</sup> Namun akhirnya tetap diputuskan bahwa PKS bukan partai inklusif, melainkan partai kader, partai dakwah yang berasaskan Islam.<sup>42</sup> Begitu juga PPP, melalui Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, beberapa kali menyatakan PPP sebagai partai terbuka, sehingga konstituennya tidak hanya umat Islam saja, melainkan juga umat agama non-Islam, termasuk Cina.

Apakah kalau menjadi partai terbuka, lantas partai-partai Islam akan menang dalam pemilu atau dapat menaikkan jumlah suara yang signifikan? Rupanya tidak juga, karena berdasarkan pengalaman sejarah PAN dan PKB sebagai partai terbuka dan berideologi Pancasila, dengan harapan memperoleh suara yang besar, dan keduanya sama-sama memiliki struktur budaya dan struktur sosial yang kuat, yakni Muhammadiyah dan NU, tidak pernah menang dalam pemilu, bahkan dari pemilu ke pemilu perolehan suara terus merosot (lihat tabel 6). Apakah kalau menjadi partai eksklusif dengan mencantumkan Islam sebagai ideologi partai, lantas juga akan menang dalam pemilu atau mendapatkan jumlah suara yang signifikan? Jawabannya, tidak juga. PPP, PKS, PBB, PBR dan PMB misalnya perolehan suaranya juga merosot, bahkan PBB, PBR dan PMB tidak lolos parlementary threshold, sehingga tidak memiliki wakilnya di parlemen. Tidak mencantumkan Islam sebagai ideologi partai, kalah dalam pemilu, mencantumkan Islam sebagai ideologi partai juga kalah, bahkan cenderung tidak dilirik oleh umat Islam.

Berdasarkan pengalaman sejarah di atas, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana format partai politik Islam pada masa depan? Ada beberapa pemikiran yang perlu dipertimbangkan; *pertama*, umat Islam yang jumlahnya

besar ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya, harus diyakini bahwa masih banyak umat Islam yang memandang berpolitik itu bagian dari ibadah, dan mereka hanya mau menyalurkan ke partai politik Islam. *Kedua*, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik, dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat. *Ketiga*, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang semua memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga, maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah; *Keempat*, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu *rahmatan lil' alamin*, hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat. *Kelima*, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. *Keenam*, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidiq, amanah, tabligh dan fathonah, dalam bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus *dhabid* (cerdas) dan *ghairu syadz* (tidak cacat moral), memiliki leadership yang kuat dan skill manajerial yang memadai. Sedangkan kriteria eksternal adalah dapat diterima oleh semua pihak, disenangani oleh umat Islam dan disegani oleh umat non-Islam. Tawaran ini sangat ideal, sehingga sulit juga terwujud dalam tataran empiris, tetapi siapa tahu ada perubahan berpikiran umat Islam untuk mewujudkan cita-cita ideal yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis di kehidupan nyata.

## Penutup

Ada beberapa kata kunci yang diajarkan oleh Islam, yakni tidak boleh putus asa, selalu berikhtiar semaksimal mungkin, berpikir rasional dan futuristik, menjaga ukhuwah Islamiyah dan tidak boleh bercerai berai artinya umat Islam itu harus bersatu padu, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dakwah amar makruf makruf nahi munkar. Politik sebagai salah satu media mewujudkan cita-cita Islam membangun peradaban yang anggun dan berkarakter. Siapapun yang terjun ke dunia politik harus melengkapi dirinya dengan seperangkat nilai-nilai luhur Islam, sehingga perubahan-perubahan yang diciptakan selaras dengan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah.

Politik harus dilihat bukan sebagai media yang hanya untuk meraih kekuasaan dalam jangka pendek, tetapi untuk membumikan Islam dalam jangka panjang. Kekalahan dalam berpolitik bukan lantas meleburkan dirinya ke dalam partai yang menang, sehingga menanggalkan idealisme atau tujuan partai. Kekalahan harus dianggap sebagai titik pijak untuk menang di masa yang akan datang, tetapi kadang mentalitas kalah itu yang tidak dimiliki oleh pemimpin partai politik, sehingga ditempuhlah jalan berpikir pragmatis.

Pragmatisme dalam berpolitik itu membunuh jati diri sebuah partai Islam, apalagi sampai "melacurkan partai" hanya karena imbalan kursi menteri atau Duta Besar. Partai Islam harus memiliki jati diri yang kokoh, dan semangat yang tinggi untuk bekerjasama antar partai Islam, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dihadapan partai-partai sekuler, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Partai-partai Islam yang mendapatkan tiket masuk ke parlemen hanya dijadikan mesin politik untuk mendulang suara bagi partai sekuler.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian. 2004. *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam.
- Al-Barsani, Nur Iskandar. 1999. "Langkah Mundur Menggunakan Azas Sektarian", dalam *Tashfirul Afkar*, No. 4.
- Al-Syahastrani. 2004. *al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Islam* (terj.Syuaidi Asy'ari). Bandung: Mizan Media Utama, 2004.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. 1986, *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Amal, Ichlasul. 1988. "Pengantar", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- \_\_\_\_\_. 1999. "The Islamic Factor in Post-Soeharto Indonesia", dalam *Profetika Journal Studi Islam*, Vol. 1, No.2, Juli.
- \_\_\_\_\_. 1999. "Kian Meluas Penggunaan Simbol Agama", dalam *Tashfirul Afkar*, No. 2.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2009. "Pemilu Legislatif dan Golput", dalam *Republika*, Kamis 9 April
- \_\_\_\_\_. 2009. "Politik Kepentingan", dalam *Republika*, Kamis 7 Mei.
- Burdah, Ibnu. 2008. *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu dan Dimensi Konflik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Choirie, A.Effendy. 2008. *Islam-Nasionalisme PKB-UMNO Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil-324.
- Collier, Kit. 2006. "The Philippines", dalam Greg Fealy and Virginia Hooker (ed.), *Voice of Islam in Southeast Asia A Contemporary Sourcebook*. Singapore: Insatitute of Southeast Asian Studies.
- Dahl, Robert A.. 1992. *Demokrasi dan Para Pengeritiknya* (terj.:Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor.
- Esposito, John L. dan John O. Voll. 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Bandung: Mizan.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Forrester, Geoff (ed.). 1999. *Post Soeharto Indonesia? Renewal or Chaos*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz Clifford. 1983. Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa* (terj.: Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hakim, Khalifa Abdul. 1993. *Islamic Ideology*. Lahore: Institute of Islamic Culture.
- Hasan, Muhammad Kamal. 1982. *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hornby, A.S. 1989. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- <http://www.kpu.go.id>.
- Hunter, Shireen T. (ed.). 2001. *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan* (terj.: Ajat Sudrajat). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Irsyam, Mchrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Islam, Syed Serajul. 2005. *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson Learning.
- Ismail, Faisal. 1995. *Islam in Indonesian Politics, A Studi of Muslim Responses to and Acceptance of the Pancasila*. Dissertation unpublished. Canada: McGill University Montreal.
- Jawa Pos*, Senin 20 April 2009.
- Juergensmeyer, Mark. 1995. The New Religious State, dalam *Journal Comparative Politics*, Vol 27, No. 4, Juli 1995.
- Kfoury, Assaf. 1997. Hizb Allah and Lebanese State, dalam Joel Beinin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essays From Middle East Report*. New York: I.B. Taurus Publisher.
- Kaisiepo, Manuel. 1988. Kaisiepo, Fenomena Kelahiran Partai-Partai Politik Baru: Mencari Konfigurasi Baru yang Kukuh dan Stabil, dalam *Kompas*, Minggu, 26 Juli 1998.
- Kompas, Litbang. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Kuntowijoyo, 1998. "Enam Alasan Tidak Mendirikan Parpol Islam", dalam *Republika*, 27 Juli 1998.
- \_\_\_\_\_, 1998. "Struktur Budaya, Struktur Sosial, dan Struktur Teknik", dalam *Hikmah*, Minggu IV, Juni 1998
- Lev, Daniel S.. 1988. "Partai-Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Parleментар (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965)", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madjid, Nurcholish. 1999. "Partai Keadilan Nanti Muncul sebagai Partai Penting", dalam Hairus Salim (ed.), *Tujuh Mesin Pendulum Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*. Yogyakarta: LkiS.

- Mashad, Dhurorudin. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Murtopo, Ali. 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP
- Noer, Deliar. 1983. *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- \_\_\_\_\_. 1988. Istilah Politik Aliran itu Bikin Kacau, dalam *Republika*, 27 Juli.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2007. *Indonesia and the Muslim World*. Malaysia: Nias Press.
- Pranowo, Bambang. 1988. *Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (1973-1986)*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Republika*, Kamis 9 April 2009
- Republika*, Sabtu, 11 April 2009
- Republika*, Ahad, 10 Mei 2009
- Republika*, Senin 25 Mei 2009
- Republika*, Rabu 3 Juni 2009
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roy, Olivier. 1996. *Gagalnya Islam Politik* (terj: Harimurti dan Qomaruddin SF). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Samson, Allan A. 1972. *Islam and Politics in Indonesia*. Berkeley: University of California.
- Setiawati, Siti Muti'ah. 2006. *Efektifitas Mekanisme Consociational untuk Mengendalikan Konflik Antar Komunitas di Lebanon Sejak 1943*. Disertasi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Studi Pasca Sarjana (S3) UGM.
- Shihab, Alwi. 2003. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Shobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: MUP.
- Suparlan, Parsudi. 1983. Kata Pengantar, dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa* (terj.:Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tibi, Bassam. 2000. *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru* (terj.: Imron Rosyidi dkk.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- UI, Laboratorium Ilmu Politik FISIP. 1988. *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.





















